

BAB 1

1.1 Latar Belakang

Pada awal 2018, pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan pertama 2018 tetap menunjukkan stabilitasnya diangka 5,06 persen, dan yang paling mengejutkan adalah pertumbuhan ekonomi berdasarkan provinsi menunjukkan papua sebagai provinsi dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi di angka 28,93 persen (BPS,2018). Mayoritas provinsi di indonesia mengalami pertumbuhan ekonomi diatas rata-rata nasional (BPS,2018), sedangkan hanya beberapa provinsi yang mengalami pertumbuhan ekonomi dibawah rata-rata nasional. Sementara itu, dalam perspektif asia rata-rata pertumbuhan ekonomi Indonesia 3 tahun terakhir ini masih lebih baik dibandingkan Thailand, hongkong, korea selatan, dan singapura (Hirawan, 2018).

Walaupun bukan suatu indikator yang bagus, tingkat kesejahteraan masyarakat dilihat dari aspek ekonominya, dapat di ukur dengan Pendapatan Nasional (PN) per kapita. Untuk dapat meningkatkan PN, pertumbuhan ekonomi, diukur dengan pertumbuhan PDB, dan menjadi salah satu target penting yang harus di capai dalam pembangunan ekonomi. Oleh karena itu, tidak heran jika pada awal pembangunan ekonomi, umumnya dibanyak Negara perencanaan pembangunan ekonomi lebih berorientasi pada pertumbuhan bukan distribusi pendapatan. Selain pertumbuhan, proses pembangunan ekonomi juga akan membawa dengan sendirinya suatu perubahan mendasar dalam struktur ekonomi.

Pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan merupakan kondisi utama atau suatu keharusan bagi kelangsungan pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan. Perekonomian tanpa disertai dengan penambahan kesempatan kerja akan mengakibatkan ketimpangan dalam pembagian dari penambahan pendapatan tersebut (*ceteris paribus*), yang selanjutnya akan menciptakan suatu kondisi pertumbuhan ekonomi dengan peningkatan kemiskinan. Melihat kondisi pembangunan ekonomi Indonesia selama pemerintahan orde baru (sebelum terjadi krisis keuangan asia 1997/1998), dapat dikatakan bahwa Indonesia telah mengalami suatu proses pembangunan ekonomi yang spektakuler, paling tidak pada tingkat makro (agregat). Bahkan pencapaian yang cemerlang ini sampai membuat bank dunia menobatkan Indonesia bersama-sama dengan Malaysia dan Thailand sebagai “*Macan Asia*”.

Pertumbuhan dan pemerataan ekonomi merupakan indikator dalam proses pertumbuhan sebuah Negara, terlebih bagi Negara yang sedang berkembang dimana pembangunan diarahkan untuk mencapai tingkat kemakmuran bagi rakyatnya. Di Indonesia tujuan tersebut tercantum dalam pembukaan UUD 1945 yaitu untuk “Memajukan kesejahteraan umum”, tujuan ini memiliki maksud bahwa kesejahteraan masyarakat Indonesia merupakan prioritas terpenting dalam proses pembangunan Indonesia. Karena pada dasarnya pembangunan yang mengutamakan pertumbuhan ekonomi yang terpusat tidak merata serta tidak diimbangi kehidupan sosial, politik, ekonomi yang demokratis dan berkeadilan dapat menghasilkan fundamental pembangunan ekonomi yang rapuh, dimana hal

tersebut telah mengakibatkan Indonesia terjebak dalam krisis ekonomi yang berkepanjangan serta menurunnya daya saing ekonomi nasional.

Hal tersebut dapat dilihat ketika Indonesia dilanda krisis ekonomi pada periode 1997-1998 yang dikenal dengan sebutan krisis keuangan asia, yang mengakibatkan menurunnya nilai tukar rupiah terhadap dolar dan situasi pada sektor rill menunjukkan banyak usaha-usaha besar yang gulung tikar. Krisis ekonomi yang melanda Indonesia sejak pertengahan tahun 1997 lalu yang diawali dengan krisis nilai tukar rupiah terhadap dolar dan krisis moneter telah mengakibatkan perekonomian Indonesia mengalami suatu resesi yang besar dan berpengaruh negatif hampir kepada seluruh lapisan masyarakat terutama dalam bentuk tingkat inflasi yang tinggi, pendapatan rill masyarakat perkapita menurun, dan pengangguran serta kemiskinan meningkat (Tambunan,2002).

Hal ini perlu dicermati kembali bahwa dengan mengembangkan perekonomian rakyat yang di dukung pertumbuhan ekonomi nasional yang berkelanjutan, nantinya akan menciptakan lapangan kerja yang memadai, mendorong peningkatan pendapatan masyarakat, dan mengurangi tingkat kemiskinan. Pemberdayaan tingkat ekonomi dapat dilakukan melalui berbagai cara, dimana salah satunya dengan mengembangkan Usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) yang telah banyak terdapat diindonesia. pengembangan UMKM merupakan salah satu langkah yang tepat dalam meningkatkan dan memperkuat dasar kehidupan perekonomian dari sebagian terbesar rakyat Indonesia, khususnya melalui penyediaan lapangan kerja dan mengurangi kesenjangan dan tingkat kemiskinan. Walaupun kecil dalam skala jumlah pekerja,

aset dan omzet, namun karena jumlahnya cukup besar, maka peranan UMKM cukup penting dalam menunjang perekonomian. Menurut (Dwi R,2017), setidaknya ada 3 peran UMKM dalam kehidupan masyarakat yaitu (1) sarana mengentaskan masyarakat dari jurang kemiskinan (2) sarana untuk meratakan tingkat perekonomian rakyat kecil (3) memberikan pasukan devisa bagi Negara.

Dalam menjalankan kegiatan usaha serta upaya meningkatkan keuntungan perusahaan, salah satu faktor yang mempengaruhi adalah modal, baik modal sendiri maupun modal yang bersumber dari perbankan. Tanpa adanya modal yang cukup tentu akan menghambat proses tumbuh dan berkembangnya suatu usaha untuk mencapai suatu keberhasilan, dalam usaha diperlukan dana yang cukup untuk mengembangkan usaha tersebut.

Permodalan merupakan salah satu masalah yang selama lebih dari tiga puluh tahun belum dapat dipecahkan dibanding berbagai kendala yang dihadapi dalam pengembangan UMKM, dengan melihat permasalahan yang dihadapi oleh sektor UMKM dalam hal permodalan, serta mengingat bagaimana pentingnya UMKM terhadap perekonomian nasional, karena selain menghambat kelangsungan bisnis dapat juga menjadi penyebab gagalnya usaha yang tengah dirintis. Di butuhkan peran pemerintah untuk mengadakan kebijakan ekonomi terkait pemberdayaan UMKM terutama berupa bantuan kredit usaha dengan beban kredit yang ringan dengan prosedur yang mudah.

Untuk membantu masalah permodalan bagi UMKM pemerintah berupaya untuk mengurai masalah tersebut dengan salah satu program pemerintah dalam meningkatkan akses pembiayaan UMKM kepada lembaga keuangan dengan pola

penjaminan adalah kredit usaha rakyat (KUR) yang diluncurkan pada November 2007 (Kur,2018) yaitu sebagai respon atas instruksi presiden No.6 tahun 2007 tentang kebijakan percepatan pengembangan sektor rill dan pemberdayaan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM).

Kredit Usaha Rakyat (KUR) merupakan sumber pendanaan usaha rakyat dengan memberikan pinjaman atau kredit kepada Usaha Mikro Kecil Menengah dan Koperasi (UMKMK) menurut cermati.com. Dalam perkembangannya, program KUR telah mengalami beberapa perubahan baik skema maupun regulasi. Salah satu perubahan yang telah ditetapkan oleh pemerintah demi mendukung perkembangan UMKM adalah penurunan suku bunga.

Kinerja Bank BRI, dalam satu dekade terakhir (2008-2018) telah menyalurkan KUR Rp302,4 triliun. Jumlah tersebut berhasil disalurkan kepada 23,8 juta pelaku UMKM yang memanfaatkan nya untuk naik kelas atau meningkatkan kesejahteraan. Tahun ini, walau ditengah kondisi ekonomi yang cenderung melambat, Bank BRI berhasil menjadi bank penyalur terbaik dengan menyalurkan Rp69,73 triliun. Sedangkan debitur yang menerima turut naik menjadi 3,87 juta nasabah ditahun sebelumnya. Tren distribusi KUR secara volume penyaluran mayoritas masih berada jawa dan Madura sebesar 57% lalu sumatera sebesar 18%, kemudian kawasan Sulawesi dan Maluku mencapai 12%, wilayah NTB dan NTT sebesar 7% hingga papua sebesar 1%. Sementara, jika dilihat dari jumlah peminjam atau debitur yang mengakses KUR didominasi dari wilayah jawa dan Madura 62%, sumatera dengan porsi 16%, Kalimantan sebesar

5%, Sulawesi dan Maluku dikisaran 11%, wilayah bali, NTB, NTT sebesar 5% dan dipapua menyumbang 1% jumlah debitur (BRI,[2018](#)).

Pada tahun 2018, diwilayah sumatera selatan Bank Rakyat Indonesia (BRI) hingga November lalu mencatat penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) melebihi target tahunan dengan total penyaluran hingga 2,1 triliun. “menurut wakil pimpinan BRI kantor wilayah Palembang, Nur Cahyo Budi Santoso” mengatakan besaran dana KUR tersebut diberikan kepada 106 ribu penerima atau nasabah diwilayah kerja Palembang, babel, dan jambi. Penyaluran KUR per November mencapai 102,71 persen atau melebihi target dari semua kanwil, untuk Palembang penyaluran sekitar 57 ribuan dengan plafon sebesar 1,1 triliun. Pencapaian tersebut dikarenakan luasnya jangkauan layanan bank BRI yang hingga pelosok daerah (Purwanti,2018).

BRI unit cengal merupakan salah satu dari banyak bank yang sampai sekarang masih aktif memberikan kredit kepada nasabah (pelaku UMKM). Hampir sebagian besar pengusaha mikro diwilayah talang jaya kecamatan sungai menang kabupaten OKI mengajukan pinjaman modal di BRI unit cengal, dengan harapan mereka nantinya dapat memperoleh dana pinjaman dari bank. Namun dari keseluruhan pengajuan yang masuk ke BRI unit cengal hanya sebagian kecil saja yang berhak menerima pinjaman dari BRI. Termasuk pemilik usaha atau pelaku UMKM dikecamatan sungai menang kabupaten Oki yang menerima dana KUR. Ada beberapa alasan mengapa dana KUR diberikan oleh BRI unit cengal.

- (1) Kurangnya modal pemilik usaha untuk mengembangkan usahanya,
- (2) Kecilnya risiko pengembalian dana kredit yang tidak tepat waktu.
- (3) Waktu

pengembalian kredit yang tergolong kedalam jangka pendek. (4) Kesepakatan antara pemilik usaha dan pihak bank yang telah menyetujui perjanjian dimana terdapat hak dan kewajibannya masing-masing.

Karena didaerah kabupaten OKI masih terdapat pelaku UMKM yang pendapatannya menurun yang diakibatkan karena susahya akses masuknya barang dagangan kedaerah Sp1 Talang Jaya sehingga membuat harga jual melambung tinggi sedangkan pendapatan ekonomi masyarakatnya masih dianggap kurang dari rata-rata pendapatan. Pada saat ini pendapatan didaerah Talang Jaya kecamatan sungai menang memiliki rata-rata pendapatan kurang lebih dibawah UMR yaitu sekitar 2.000.000 hasil wawancara dari 30 pelaku UMKM . Hal ini dapat menjadi salah satu faktor yang juga mempengaruhi pembayaran kredit pada bank BRI, Sehingga dapat dijadikan bahan penelitian untuk mengetahui penyebab fenomena tersebut dan pengaruh adanya program KUR masyarakat melalui Bank Rakyat Indonesia (BRI) dengan proses yang mudah, murah, cepat, dengan tingkat suku bunga yang rendah sehingga meningkatkan pendapatan dan perkembangan para pelaku usaha UMKM. Serta mengetahui ke efektifan program tersebut yang ditentukan pemerintah melalui Bank BRI.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“Pengaruh Kredit Usaha Rakyat (Kur) Bank Rakyat Indonesia (Bri) Unit Cengal Terhadap Pendapatan & Perkembangan UMKM”** Dikecamatan Sungai Menang Kabupaten Ogan Komering Ilir.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang, maka penulis merumuskan permasalahan dalam penelitian ini bagaimana Pengaruh kredit Usaha Rakyat Terhadap Pendapatan dan Perkembangan UMKM Bank Rakyat Indonesia (BRI) unit cengal?

1.3 Ruang Lingkup Pembahasan

Dalam penelitian ini, penulis membatasi permasalahan agar pembahasan diatas dapat terarah, sehingga ruang lingkup pembahasan hanya sebatas Pengaruh Kredit Usaha Rakyat (KUR) Bank Rakyat Indonesia (BRI) unit cengal terhadap Pendapatan dan Perkembangan UMKM di kecamatan sungai menang, Ogan Komering Ilir.

1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.4.1 Tujuan Penelitian

Penelitian ini tidak terlepas dari tujuan yang hendak dicapai, sesuai dengan rumusan masalah diatas. Maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Pengaruh Kredit Usaha Rakyat (KUR) Bank Rakyat Indonesia (BRI) unit cengal terhadap pendapatan dan perkembangan UMKM.

1.4.2 Manfaat Penelitian

Sesuai dengan pembahasan pada penelitian ini, maka manfaat penelitian ini adalah :

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini dapat menambah wawasan dan pengetahuan serta pengalaman penulis dalam bidang penelitian mengenai Pengaruh Kredit Usaha

Rakyat (KUR) Bank Rakyat Indonesia (BRI) unit cengal terhadap pendapatan dan perkembangan UMKM.

2. Manfaat Praktis

- Bagi Bank Rakyat Indonesia (BRI) unit Cengal

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan masukan bagi perusahaan dalam meningkatkan kinerja kredit usaha rakyat (KUR)

- Bagi Pengusaha Mikro

Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu para pengusaha mikro dalam rangka mengembangkan usahanya melalui pinjaman kredit.

- Bagi Pemerintah

Hasil penelitian ini dapat digunakan untuk sebagai bahan masukan dalam membimbing dan membina lebih lanjut perkembangan kreditur dan debitur.

- Bagi Pihak Lain

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan bacaan dan pertimbangan bagi peneliti lainnya dimasa yang akan datang.

1.5 Sistematika Penulisan

BAB I Pendahuluan

Bab ini berisi mengenai latar belakang, perumusan masalah, ruang lingkup pembahasan, tujuan dan manfaat penelitian.

BAB II Landasan Teori dan Kerangka Pemikiran

Bab ini menguraikan tentang pengertian kredit, pengertian Kredit Usaha Rakyat (KUR), pengertian Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), penelitian terdahulu, kerangka pemikiran dan paradigma penelitian.

BAB III Metodologi Penelitian

Bab ini menguraikan tentang objek dan metodologi penelitian, sumber dan tehnik pengumpulan data, serta tehnik analisa data.

BAB IV Analisis dan Pembahasan

Bab ini membahas tentang gambaran umum pelaksanaan dan sistematika Pengaruh Kredit Usaha Rakyat (KUR) Bank Rakyat Indonesia (BRI) unit cengal Terhadap Pendapatan dan Perkembangan UMKM.

BAB V Kesimpulan dan Saran

Bab ini menguraikan tentang kesimpulan dan saran mengenai Pengaruh KUR terhadap pendapatan dan perkembangan UMKM

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN